

**PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)
DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL
DI PROVINSI BALI PERIODE 2016-2020**

Muhammad Naufal Rifqi Aldya^a, Rino Rinaldo^b, Elvia Fardiana^c

^aFakultas Ekonomi, munarial2000@gmail.com, Universitas Gunadarma

^bFakultas Ekonomi, rino_rinaldo@staff.gunadarma.ac.id, Universitas Gunadarma

^cFakultas Ekonomi, via@staff.gunadarma.ac.id Universitas Gunadarma

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze whether Regional Taxes, General Allocation Funds and Special Allocation Funds affect Capital Expenditures in the Provincial Government of Bali for the 2016-2020 period. The research variables used consist of independent variables, namely Regional Taxes, General Allocation Funds and Special Allocation Funds and the dependent variable, namely Capital Expenditures. The analytical method used is the multiple regression test, hypothesis testing, namely the t-test and F-test and the Coefficient of Determination Test. Based on the results of the study, it shows that partially Regional Taxes and Special Allocation Funds have an effect on Capital Expenditures, while General Allocation Funds have no effect on Capital Expenditures. Simultaneous test results show that Regional Taxes, General Allocation Funds and Special Allocation Funds have an effect on Capital Expenditures.

Keywords: *Regional Tax, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure*

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali Periode 2016-2020. Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel bebas yaitu Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan variabel terikat yaitu Belanja Modal. Metode analisis yang digunakan adalah Uji regresi berganda, Uji hipotesis yaitu uji-t dan uji-F serta Uji Koefisien Determinasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

1. PENDAHULUAN

Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan tersebut diperlukan pendanaan. Pemerintah daerah dapat memperoleh pendanaan yang bersumber dari pendapatan daerah salah satunya berasal dari pajak daerah, kemudian dapat bersumber dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah yaitu belanja yang digunakan untuk kegiatan operasional dan kegiatan belanja modal. Pajak daerah adalah salah satu sumber dari pendapatan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah yaitu belanja yang digunakan untuk kegiatan operasional dan kegiatan belanja modal. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan dalam rangka untuk membantu program pembangunan di daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di provinsi Bali pada periode 2016-2020.

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Halim (2017), bahwa akuntansi pemerintahan merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah dan tindakan. Proses akuntansi pemerintahan harus berpatokan kepada Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2.2 Otonomi Daerah

Kata otonomi diambil dari kata autos (Bahasa Yunani) yang artinya “sendiri” dan nomos yang artinya yaitu peraturan atau Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah dan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Sujarweni, 2015).

2.3 Pajak Daerah

Pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 yaitu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi salah satu dana perimbangan yang juga mempunyai sumbangsih yang cukup besar dalam mendukung pembangunan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Azhari Azis, 2015).

2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Putu Gede Mahendra Putra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui (2015) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang

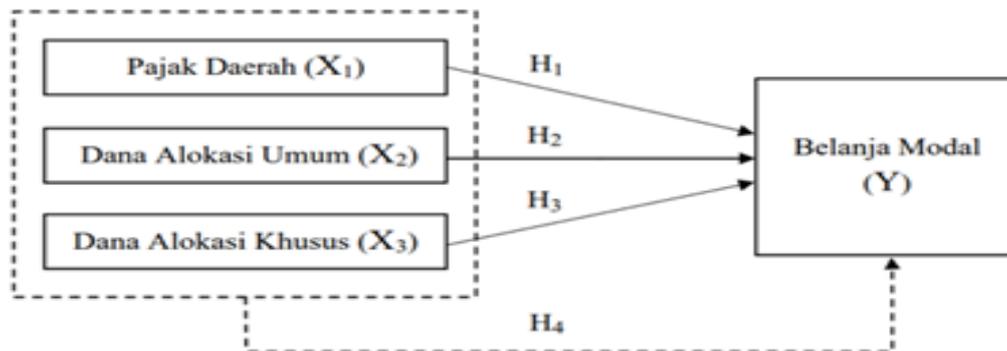
dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD.

2.6 Belanja Modal

Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Mardiasmo (2009) belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal akan memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran serta menambah aset daerah sehingga akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

2.7 Model Penelitian dan Hipotesis

Berdasarkan penjelasan mengenai pajak daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja modal maka model penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah :

- H1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal
- H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal
- H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal
- H4 : Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal dengan unit analisis adalah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (LRAPBD) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali periode 2016-2020 yang terdapat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota Provinsi

Bali periode 2016-2020 yang diperoleh melalui <http://www.djpk.depkeu.go.id/> situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

3.3 Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.
2. Variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan sebagai pelengkap penelitian ini, adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari, mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan pemecahan masalah dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 25. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, serta dilanjutkan dengan pengujian hipotesis berupa uji-t dan uji-F serta uji determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif terlihat di Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	45	16049.00	4989884.00	558575.3333	1126406.49188
DAU	45	330337.00	998167.00	648561.4222	173653.07522
DAK	45	88426.00	320553.00	176165.6000	57290.87252
Belanja Modal	45	57141.00	1603762.00	326429.8889	307930.00240
Valid N (listwise)	45				

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 16.049, nilai maksimum sebesar Rp. 4.989.884, rata-rata (mean) pajak daerah sebesar Rp. 558.575.33 dengan standar deviasi sebesar. 1.126.406.49188.

Variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 330.337 dan nilai tertinggi sebesar Rp. 998.167 serta nilai rata-rata (mean) DAU sebesar Rp. 648.561,4222 dengan standar deviasi sebesar 173.653,07522.

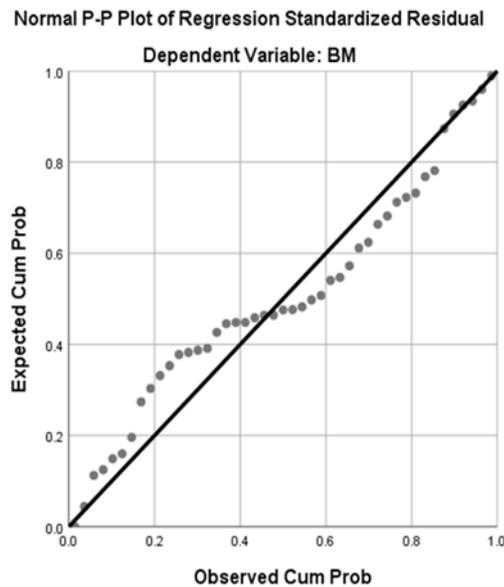
Variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 88.426, nilai maksimum sebesar Rp. 320.553, nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 176.165,6000 dengan standar deviasi sebesar 57.290,87252.

Variabel Belanja Modal menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 57.141 dan Belanja Modal tertinggi sebesar Rp. 1.603.762, nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 326.429,8889 dengan standar deviasi sebesar 326.429,8889.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil Uji Normalitas drngan menggunakan Normal Probability Plot adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan Gambar 2, terdapat grafik Normal Probability Plot menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	111879.75873869
Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.096
	Negative	-.129
Test Statistic		.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058 ^c

Berdasarkan hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa variabel independen Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta variabel dependen Belanja Modal memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,058 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ ($0,058 > 0,05$) hal ini dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian model regresi layak digunakan dalam penelitian.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Salah satu cara untuk melihat multikolinieritas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PD	.446	2.242
DAU	.163	6.147
DAK	.234	4.267

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Tolerance dari masing-masing variabel Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah lebih dari 0,10. Sedangkan nilai Variance Inflation Factors (VIF) dari masing-masing variabel Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah kurang dari 10,00. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance dan VIF untuk setiap variabel independen memenuhi kriteria, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi ini dan dapat dinyatakan uji multikolinearitas terpenuhi

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.

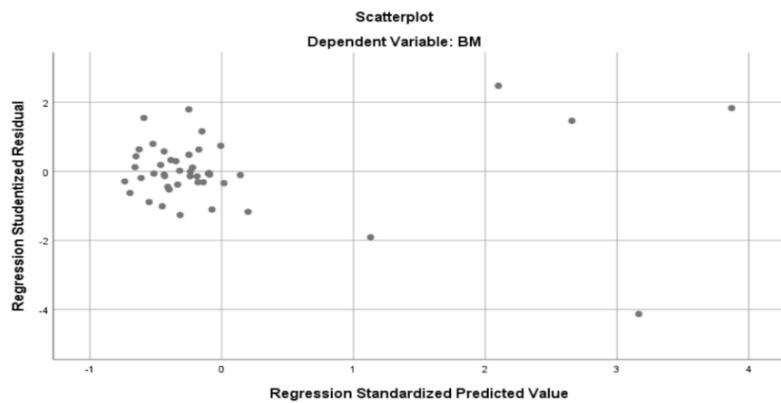
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.932 ^a	.868	.858	115900.66587	1.552

Berdasarkan Tabel 4, uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW test) adalah sebesar 1,552. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai Durbin-Watson berada diantara -2 sampai +2 sebagai syarat tidak terjadinya autokorelasi pada model regresi ini.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Gambar 3. Grafik Uji Hereroskedastisita

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas dengan grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan dinyatakan Uji Heteroskedastisitas terpenuhi.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda digunakan untuk melihat pengaruh Pajak Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal pada Provinsi Bali periode 2016-2020. Hasil perhitungan regresi dengan menggunakan software SPSS 25.0, dapat dilihat melalui Tabel 5. sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized
		B	Std. Error	Coefficients
1	(Constant)	174387.249	95439.215	
	PD	.230	.023	.842
	DAU	-.399	.249	-.225
	DAK	1.602	.630	.298

Persamaan regresi yang diperoleh dari analisis regresi linier berganda pada tabel 5 adalah sebagai berikut:

$$BM = 174387.249 + 0.230PD - 0.399DAU + 1.602DAK + e$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 174387.249 dengan arah positif yang menyatakan bahwa jika variabel independen Pajak Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) dianggap konstan atau tidak berubah (sama dengan 0) maka nilai variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y) akan Naik sebesar 174387.249.

2. Nilai koefisien Pajak Daerah (X1) sebesar 0.230 dengan arah positif, yang berarti jika variabel independen lainnya tetap dan Pajak Daerah (X1) mengalami kenaikan sebesar satu–satuan, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.230 satuan. Apabila Pajak Daerah (X1) semakin meningkat maka Belanja Modal (Y) akan semakin meningkat pula.
3. Nilai koefisien Dana Alokasi Umum (X2) sebesar -0.399 dengan arah negatif yang berarti jika variabel independen lainnya tetap dan Dana Alokasi Umum (X2) mengalami kenaikan sebesar satu–satuan, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0.399 satuan. Apabila Dana Alokasi Umum (X2) semakin meningkat maka Belanja Modal (Y) akan semakin menurun.
4. Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus (X3) sebesar 1.602 dengan arah positif yang berarti jika variabel independen lainnya tetap dan Dana Alokasi Khusus (X3) mengalami kenaikan sebesar satu–satuan, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1.602 satuan. Apabila Dana Alokasi Khusus (X3) semakin meningkat maka Belanja Modal (Y) akan semakin meningkat pula.

4.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.932 ^a	.868	.858	115900.66587

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi dalam Tabel 6. menunjukkan bahwa nilai dari Adjusted R-Square sebesar 0,858 atau 85,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 85,8%. Sementara sisanya yaitu sebesar 14,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji simultan dengan F-test pada dasarnya adalah uji untuk menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama (*simultan*) terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3621367462295.651	3	1207122487431.884	89.863	.000 ^b
	Residual	550751538278.796	41	13432964348.263		
	Total	4172119000574.447	44			

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji parsial dengan t-test digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara satu persatu.

Tabel 8. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	174387.249	95439.215		1.827	.075
PD	.230	.023	.842	9.909	.000
DAU	-.399	.249	-.225	-1.599	.118
DAK	1.602	.630	.298	2.542	.015

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan nilai signifikansi Pajak Daerah sebesar 0,000 dimana $0,000 < 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti semakin besar tingkat penerimaan pajak daerah akan meningkatkan tingkat belanja modal. Perkembangan pendapatan daerah di Bali dalam 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang positif. Hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2019, pendapatan daerah Bali sebesar 79,90% bersumber dari pajak daerah. Artinya pemerintah daerah telah menunjukkan kemandiriannya dalam meningkatkan potensi PAD yang ada. Capaian PAD menjadi salah satu dasar dalam kebijakan menentukan belanja daerah khususnya belanja modal.

4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji signifikansi parsial (uji-t) menunjukkan nilai signifikansi Dana Alokasi Umum sebesar 0,118 dimana $0,118 > 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti naik turunnya Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Bali tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung digunakan untuk belanja daerah yang bersifat konsumtif dibandingkan digunakan untuk belanja yang bersifat produktif seperti belanja modal.

4.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji parsial (uji t) menunjukkan nilai signifikansi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,015 dimana $0,015 < 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti jika Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus sendiri terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik. Dana Alokasi Khusus memang dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah, dana alokasi khusus diberikan sesuai prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
2. Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber penerimaan daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Berusaha untuk terus meningkatkan perolehan Pajak Daerah agar meningkat setiap tahun, yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian Belanja Modal lebih optimal terutama untuk pembangunan. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus harus dikelola secara optimal dan produktif.
2. Bagi penelitian selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama, disarankan untuk menambah variabel independen lain seperti Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), SiLPA dan sebagainya. Serta disarankan untuk menggunakan periode waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abbas, Dirvi Surya et al. 2020. Belanja Modal di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung*. ISSN-P: 2502-4574, ISSN-E: 2686-2581, Volume 6 Nomor 2, Desember 2020.
- [2] Abdul Halim & Syukry Abdullah, 2008, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2, No.2, November 2006*.
- [3] Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November*.
- [4] Azhari Aziz Samudra, 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers).
- [5] Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol 2 No 1*.
- [6] Gde, Putu Mahendra Putra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 11, No. 3 (2015) : 863-877. ISSN: 2302-8556*.
- [7] Halim, A., & Kusufi, M. S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Mardiasmo. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- [9] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [10] Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [11] Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [12] Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.